

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2022

PERDAKAB. PASURUAN NO. 9, LD 2022/NO. 9, 106 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 9 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pasuruan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKab. Pas No. 2 Tahun 2021; PERDAKab. Pas No. 8 Tahun 2021.
- Di dalam Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini disebutkan bahwa Keuangan Daerah meliputi apa saja, serta pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, yang mana APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah serta Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Desember 2022.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupateen Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Perda ini diundangkan.
- Penjelasan : 30 hlm.